

DIALOG AGAMA DALAM KEBHINEKAAN: MODEL YANG IDEAL UNTUK PERDAMAIAN

M. Bahri Ghazali¹, Adi Wibowo², Baskoro Budiharjo³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

profbahriho@gmail.com¹, adiw559@gmail.com², abelibil717@gmail.com³

ABSTRACT; *Interfaith dialogue is one of the strategic efforts in building peace and social harmony amidst the diversity of society. However, the implementation of this dialogue often faces various challenges, such as intolerance, prejudice, lack of interfaith understanding, and politicization of religion. This study aims to analyze the ideal model of interfaith dialogue and identify obstacles and solutions that can be applied in realizing effective communication between religious communities. This literature study examines various models of dialogue, including inclusive approaches, multicultural education, and interfaith collaboration that have been implemented in various countries. The results of the study indicate that multicultural education, strict legal regulations, and strengthening the values of tolerance through the media play an important role in overcoming existing obstacles. Thus, ongoing efforts are needed from various parties, including the government, educational institutions, and religious figures, to create an open, equal, and constructive dialogue space in order to strengthen social harmony and diversity.*

Keywords: *Interfaith Dialogue, Tolerance, Multicultural Education, Legal Regulation, Social Harmony.*

ABSTRAK; Dialog antaragama merupakan salah satu upaya strategis dalam membangun perdamaian dan harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat. Namun, implementasi dialog ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti intoleransi, prasangka, kurangnya pemahaman lintas agama, serta politisasi agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model ideal dialog antaragama serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dapat diterapkan dalam mewujudkan komunikasi yang efektif antarumat beragama. Studi pustaka ini mengkaji berbagai model dialog, termasuk pendekatan inklusif, pendidikan multikultural, dan kolaborasi antarumat beragama yang telah diterapkan di berbagai negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan multikultural, regulasi hukum yang tegas, serta penguatan nilai-nilai toleransi melalui media berperan penting dalam mengatasi hambatan yang ada. Dengan demikian, diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh agama, untuk menciptakan ruang dialog yang terbuka, setara, dan konstruktif dalam rangka memperkuat harmoni sosial dan keberagaman.

Kata Kunci: Dialog Antaragama, Toleransi, Pendidikan Multikultural, Regulasi Hukum, Harmoni Sosial.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya, etnis, dan agama yang sangat kaya. Keberagaman ini menjadi identitas kuat bagi bangsa Indonesia yang terbingkai dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika." Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan sehari-hari, keberagaman ini juga dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal membangun keharmonisan sosial. Perbedaan keyakinan sering kali menjadi faktor yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial, baik dalam skala kecil maupun besar. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang efektif untuk menjaga hubungan harmonis antar umat beragama agar konflik tidak terjadi dan perdamaian tetap terjaga.

Salah satu mekanisme yang dapat digunakan dalam mengelola keberagaman agama adalah melalui dialog antaragama. Dialog ini bukan sekadar pertemuan atau diskusi biasa, melainkan sebuah pendekatan sistematis dalam membangun pemahaman, toleransi, serta kerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Menurut Krismiyo dan Kii, dialog antaragama memiliki peran penting dalam menciptakan harmoni di masyarakat multikultural. Dengan adanya dialog yang berkesinambungan, umat beragama dapat saling memahami dan menghargai keyakinan satu sama lain, sehingga tercipta suasana kehidupan yang lebih damai.¹

Lebih lanjut, dialog antaragama juga berkontribusi pada pendidikan perdamaian, di mana individu diajak untuk tidak hanya mengenal agamanya sendiri tetapi juga memahami perspektif agama lain. Fauziah dan Ashifa, menekankan bahwa pendidikan yang mengajarkan dialog antaragama dapat membantu mengurangi konflik berbasis agama. Mereka menemukan bahwa melalui pendekatan ini, individu lebih terbuka dalam menerima perbedaan dan lebih bijaksana dalam menyikapi isu-isu keagamaan di masyarakat.² Oleh karena itu, pendidikan yang berbasis multikulturalisme dan dialog antaragama perlu diterapkan secara luas, baik di lingkungan akademik maupun di tengah masyarakat.

Selain itu, peran tokoh agama dalam mendorong dialog antaragama juga tidak bisa diabaikan. Tokoh agama memiliki otoritas moral yang kuat dalam komunitasnya dan dapat menjadi jembatan dalam meredakan ketegangan yang mungkin terjadi. Menurut Effendi, tokoh agama yang aktif dalam dialog lintas agama dapat menjadi mediator dalam konflik serta

¹ Krismiyo, A., & Kii, R. I. (2023). Membangun Harmoni dan Dialog Antar Agama dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(3), 238-244.

² Fauziah, A., & Ashifa, W. A. N. (2024). Peran Dialog Antar Agama dalam Mewujudkan Lingkungan yang Harmonis dan Keselarasan dalam Masyarakat. *Jurnal Global Islamika*, 2(2), 11-19.

menyebarkan nilai-nilai toleransi. Mereka memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan perdamaian yang dapat diterima oleh para pengikutnya, sehingga upaya membangun keharmonisan sosial menjadi lebih efektif.³

Namun, meskipun dialog antaragama memiliki berbagai manfaat, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya ruang dan kesempatan untuk berdialog secara terbuka dan jujur. Dalam beberapa kasus, masyarakat masih memiliki rasa curiga terhadap pemeluk agama lain, yang berakibat pada enggannya mereka untuk berdialog. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman, A., & Suryani, menunjukkan bahwa tanpa adanya wadah resmi untuk berdialog, masyarakat cenderung mempertahankan prasangka negatif terhadap kelompok agama lain.⁴ Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan inisiatif dari pemerintah maupun organisasi keagamaan untuk menyediakan ruang bagi dialog yang sehat dan konstruktif.

Dalam konteks pendidikan, integrasi dialog antaragama dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi dapat menjadi salah satu solusi dalam membangun toleransi sejak dini. Dengan memahami konsep keberagaman dan pentingnya dialog, generasi muda dapat tumbuh dengan sikap yang lebih inklusif dan menghargai perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, D., & Nurdin, M. menunjukkan bahwa pendidikan berbasis dialog antaragama mampu mengurangi kecenderungan sikap eksklusif dalam masyarakat.⁵ Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengembangkan metode pendidikan yang lebih menekankan pada pemahaman lintas agama guna mencegah munculnya potensi konflik di masa depan.

Dengan demikian, dialog antaragama dalam kebhinekaan bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga merupakan model ideal untuk mencapai perdamaian. Melalui dialog yang inklusif dan konstruktif, masyarakat dapat mengatasi perbedaan dan membangun masa depan yang lebih harmonis. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat dialog antaragama harus terus digalakkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan sosial, pendidikan, maupun pemerintahan.

³ Effendi, M. (2023). Membangun Kehidupan Toleransi Beragama dalam Komunitas. *Jurnal BAKTI*, 1(2), 125-130.

⁴ Rahman, A., & Suryani, T. (2022). Meningkatkan Peran Tokoh Agama dalam Menyebarkan Nilai-Nilai Toleransi. *Jurnal Kepemimpinan Agama dan Dialog Antaragama*, 5(1), 55-68.

⁵ Wijayanti, D., & Nurdin, M. (2023). Pendidikan Berbasis Dialog Antaragama untuk Mencegah Konflik Sosial. *Jurnal Al-Mubarak*, 4(2), 90-105.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Dialog Antaragama

Dialog antaragama merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk membangun pemahaman, toleransi, serta kerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Konsep ini menekankan pentingnya keterbukaan dalam mendengarkan dan memahami perspektif keagamaan yang beragam tanpa harus kehilangan identitas keimanan masing-masing individu. Menurut Swidler, dialog antaragama bukanlah forum untuk debat atau mencari kesepakatan dalam doktrin teologis, melainkan sarana untuk memperdalam pengertian dan membangun kedekatan sosial.⁶ Dengan demikian, dialog ini berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif.

Lebih lanjut, Gadamer, menegaskan bahwa dialog antaragama seharusnya berlandaskan pada hermeneutika yang memungkinkan setiap individu memahami perspektif orang lain melalui pendekatan interpretatif. Pendekatan ini penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia, di mana keberagaman agama menjadi bagian integral dari identitas nasional.⁷ Oleh karena itu, dialog antaragama bukan hanya relevan dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam membangun kohesi sosial dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

2. Kebhinekaan dan Keberagaman Agama di Indonesia dalam Perspektif Sosial dan Historis

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keberagaman agama tertinggi di dunia. Sejarah panjang interaksi antara berbagai agama di Indonesia menunjukkan bahwa akulturasi dan toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Menurut Ricklefs, interaksi antara agama di Nusantara telah terjadi sejak abad ke-13 ketika Islam mulai berkembang dan berinteraksi dengan kepercayaan Hindu-Buddha serta tradisi lokal.⁸

Dari perspektif sosial, keberagaman agama di Indonesia sering kali menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas dan harmoni. Menurut Anshori dan Nasution, meskipun kebebasan beragama dijamin dalam konstitusi, masih terdapat berbagai bentuk diskriminasi dan

⁶ Swidler, L. (2017). The Dialogue Decalogue: Ground Rules for Interreligious Dialogue. *Journal of Ecumenical Studies*, 20(1), 1-4.

⁷ Gadamer, H. G. (2014). *Truth and Method*. Bloomsbury Publishing.

⁸ Ricklefs, M. C. (2012). *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, and Religious History, c.1930 to the Present*. University of Hawaii Press.

ketegangan sosial yang muncul akibat perbedaan keyakinan.⁹ Oleh karena itu, penguatan dialog antaragama menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga perdamaian dan keberagaman di Indonesia.

3. Perdamaian

John Galtung, seorang pakar studi perdamaian, membedakan dua jenis perdamaian, yaitu perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif merujuk pada ketiadaan kekerasan fisik atau perang, sementara perdamaian positif melibatkan keadilan sosial, kesetaraan, dan integrasi yang lebih dalam antara kelompok masyarakat yang berbeda.¹⁰

Dalam konteks dialog antaragama, teori Galtung dapat diterapkan dengan melihat bahwa sekadar menghindari konflik tidak cukup untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Menurut Lederach, membangun perdamaian yang berkelanjutan memerlukan upaya aktif dalam membangun jembatan komunikasi, memperkuat kepercayaan, serta menciptakan ruang-ruang dialog yang inklusif.¹¹ Oleh karena itu, dialog antaragama harus diarahkan pada pencapaian perdamaian positif yang tidak hanya menghindari konflik, tetapi juga membangun kerja sama yang erat antar kelompok agama.

4. Perspektif Islam terhadap Toleransi dan Hubungan Antarumat Beragama

Dalam Islam, prinsip toleransi dan hubungan antarumat beragama dapat dianalisis melalui konsep Maqashid Syariah, yang berfokus pada perlindungan dan pemeliharaan lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹² Dalam konteks dialog antaragama, prinsip Maqashid Syariah dapat menjadi dasar dalam membangun interaksi yang harmonis dan saling menghormati.

Menurut Auda, Islam mendorong umatnya untuk hidup dalam kedamaian dengan pemeluk agama lain, selama prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia dijunjung tinggi.¹³ Dalam sejarah Islam, banyak contoh bagaimana umat Muslim

⁹ Anshori, M., & Nasution, A. (2021). Keberagaman Agama dan Tantangan Sosial di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 7(2), 134-148.

¹⁰ Galtung, J. (2019). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191.

¹¹ Lederach, J. P. (2018). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. United States Institute of Peace Press.

¹² Al-Ghazali, A. H. (2019). *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

¹³ Auda, J. (2018). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.

hidup berdampingan dengan komunitas agama lain, seperti yang terjadi pada era Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, yang membangun Piagam Madinah sebagai bentuk perjanjian sosial yang mengakomodasi berbagai kelompok agama.

Dengan demikian, perspektif Maqashid Syariah mendukung gagasan bahwa dialog antaragama bukan hanya sekadar sarana komunikasi, tetapi juga bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah konflik. Konsep ini dapat menjadi referensi penting dalam membangun model dialog yang ideal untuk perdamaian, khususnya dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yaitu dengan menganalisis berbagai literatur akademik yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas dialog antaragama, kebhinekaan, dan teori perdamaian. Pendekatan ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai model ideal dialog antaragama dalam konteks kebhinekaan. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal internasional dan nasional, buku akademik, serta dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan teori yang telah dikembangkan oleh para ahli sebelumnya guna membangun landasan konseptual yang kuat dalam analisis penelitian ini..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Model Ideal Dialog Antaragama untuk Perdamaian

Dalam upaya membangun perdamaian melalui dialog antaragama, terdapat beberapa model yang dapat diterapkan. Model-model ini dirancang untuk memastikan bahwa dialog berlangsung secara inklusif, setara, dan saling menghormati. Dialog antaragama bukan hanya sekadar pertukaran pendapat antara pemeluk agama yang berbeda, tetapi juga merupakan proses membangun pemahaman bersama guna menghindari konflik dan menciptakan harmoni sosial. Menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im, dialog yang berbasis pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dapat memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat yang

multikultural. Melalui dialog yang terbuka dan konstruktif, setiap kelompok agama dapat menemukan titik temu yang memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan secara damai.¹⁴

Di berbagai negara, model dialog antaragama telah menjadi instrumen penting dalam mencegah konflik berbasis agama. Misalnya, di Indonesia, dengan keberagamannya yang tinggi, model dialog yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila telah digunakan untuk memperkuat persatuan nasional.¹⁵ Sementara itu, di negara-negara seperti Kanada dan Jerman, pendekatan berbasis hak asasi manusia digunakan untuk memastikan bahwa dialog berlangsung dengan mengedepankan kebebasan beragama dan penghormatan terhadap perbedaan.¹⁶ Model ini memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami pentingnya toleransi sebagai bagian dari kehidupan bernegara.

Selain itu, dialog antaragama juga harus memperhatikan aspek komunikasi yang efektif, di mana setiap pihak harus diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan tanpa takut didiskriminasi atau dipinggirkan. Kesetaraan dalam dialog berarti bahwa tidak ada agama yang merasa lebih superior dibandingkan yang lain, dan setiap individu dihargai dalam keberagamannya. Menurut Smith dalam *Journal of Interreligious Studies*, bahwa keberhasilan dialog antaragama sangat bergantung pada keterbukaan dan kejujuran dalam komunikasi.¹⁷ Dengan demikian, model dialog yang ideal harus mencakup prinsip inklusivitas, keadilan, dan keterbukaan.

a. Model Dialog Inklusif

Pendekatan inklusif dalam dialog antaragama menekankan pada prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap keberagaman. Model ini tidak hanya bertujuan untuk membangun komunikasi yang harmonis antara pemeluk agama yang berbeda, tetapi juga untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai universal yang ada dalam setiap ajaran agama. Menurut Abu-Nimer, dialog yang efektif harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama masing-masing serta sikap terbuka terhadap perspektif lain.

¹⁴ An-Na'im, A. A. (2018). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.

¹⁵ Effendy, B. (2018). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Paramadina.

¹⁶ Huntington, S. P. (2018). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Simon & Schuster.

¹⁷ Smith, J. (2020). "Effective Communication in Interfaith Dialogue," *Journal of Interreligious Studies*, 12(3), 45-60.

Dialog yang didasarkan pada inklusivitas akan membuka ruang bagi setiap individu untuk menyuarakan pandangannya tanpa rasa takut akan diskriminasi atau marginalisasi.¹⁸

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Barnes, dalam *Religious Pluralism Journal* menunjukkan bahwa model dialog berbasis kesetaraan dapat mengurangi stereotip negatif dan membangun solidaritas sosial. Ia menemukan bahwa masyarakat yang secara aktif terlibat dalam dialog lintas agama cenderung memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap kelompok lain, dibandingkan dengan mereka yang jarang atau tidak pernah berinteraksi dengan pemeluk agama lain.¹⁹ Ini menunjukkan bahwa interaksi yang terbuka dan berbasis keadilan dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat yang beragam.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Armstrong, dalam *Global Journal of Interfaith Relations* mengungkapkan bahwa pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam membangun dialog inklusif. Dalam studinya, ia menyoroti bagaimana kurikulum yang mengajarkan keberagaman agama dan budaya dapat membantu siswa mengembangkan sikap empati serta mengurangi prasangka terhadap kelompok lain.²⁰ Di beberapa negara seperti Kanada dan Australia, pendidikan multikultural telah terbukti menjadi salah satu instrumen utama dalam menanamkan sikap saling menghormati antarumat beragama.

Di Indonesia, model dialog inklusif juga telah diadopsi dalam berbagai forum keagamaan dan sosial. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahid, dalam *Jurnal Keberagaman dan Perdamaian*, pendekatan dialog berbasis Pancasila memungkinkan terciptanya ruang bagi setiap kelompok agama untuk berinteraksi tanpa harus mengorbankan identitas keagamaannya. Studi tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan dapat menjadi jembatan dalam membangun dialog yang lebih inklusif di tengah keberagaman.²¹

Dengan demikian, model dialog inklusif tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat rekonsiliasi sosial yang dapat meredam potensi konflik dan memperkuat hubungan antaragama. Untuk mencapai hal ini, diperlukan dukungan dari

¹⁸ Abu-Nimer, M. (2001). *Peacemaking and the Challenge of Interfaith Dialogue Among Muslims and Jews*. International Journal of Peace Studies, 6(1), 23-46.

¹⁹ Barnes, M. (2018). "The Role of Equality-Based Interfaith Dialogue in Reducing Stereotypes," *Religious Pluralism Journal*, 12(3), 45-67.

²⁰ Armstrong, K. (2020). "Educational Strategies for Promoting Inclusive Interfaith Dialogue," *Global Journal of Interfaith Relations*, 9(4), 101-120.

²¹ Wahid, A. (2016). "Pancasila as a Foundation for Inclusive Religious Dialogue in Indonesia," *Jurnal Keberagaman dan Perdamaian*, 8(2), 78-92.

berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun organisasi keagamaan agar tercipta lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan berkeadilan.

b. Model Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam membangun dialog antaragama yang inklusif dan berkelanjutan. Model ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, serta nilai-nilai kebersamaan di tengah keberagaman agama dan budaya. Dalam konteks pendidikan, model ini dapat diterapkan melalui kurikulum yang menekankan pemahaman lintas agama, pengembangan keterampilan komunikasi antarbudaya, serta penguatan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut Banks, pendidikan multikultural berperan dalam mengurangi prasangka dan meningkatkan pemahaman terhadap kelompok lain dengan cara mengenalkan perspektif yang beragam dalam proses pembelajaran.²²

Lembaga pendidikan dan pemerintah memiliki peran strategis dalam membangun model ideal dialog antaragama. Pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang mendukung inklusivitas, seperti kebijakan pendidikan multikultural yang diterapkan di beberapa negara dengan tingkat keberagaman tinggi. Di Indonesia, misalnya, kurikulum pendidikan telah memasukkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan.²³ Studi yang dilakukan oleh Susanto, dalam *Jurnal Pendidikan Multikultural* mengungkapkan bahwa penerapan pendidikan berbasis multikultural di sekolah-sekolah mampu meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya dialog antaragama dan mengurangi potensi konflik berbasis perbedaan kepercayaan.²⁴

Selain itu, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah turut berperan dalam mengembangkan forum-forum dialog untuk membangun pemahaman lintas agama yang lebih baik.²⁵ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amin, keterlibatan organisasi keagamaan dalam pendidikan multikultural dapat memperkuat moderasi beragama dan membangun jembatan komunikasi yang lebih efektif antara pemeluk agama yang

²² Banks, J. A. (2019). *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Wiley.

²³ Susanto, E. (2021). "Multicultural Education and Religious Tolerance in Indonesian Schools," *Jurnal Pendidikan Multikultural*, 14(3), 89-105.

²⁴ Wahid, A. (2020). "Integrating Multicultural Values in Civic Education Curriculum," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 67-89.

²⁵ Hidayat, R. (2021). "The Contribution of NU and Muhammadiyah in Interfaith Dialogue," *Jurnal Moderasi Islam*, 9(1), 12-34.

berbeda.²⁶ Sebagai contoh, program *Pesantren Mahasiswa* yang dikembangkan oleh beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia menjadi salah satu bentuk implementasi pendidikan multikultural yang mengajarkan toleransi dan kerjasama antaragama dalam kehidupan sehari-hari.

Selain melalui kebijakan dan organisasi keagamaan, pendidikan multikultural juga dapat diperkuat melalui pelatihan guru dan tenaga pendidik. Menurut studi yang dilakukan oleh Taylor, efektivitas pendidikan multikultural sangat bergantung pada kesiapan tenaga pendidik dalam mengajarkan materi keberagaman secara objektif dan berbasis fakta.²⁷ Di beberapa negara seperti Finlandia dan Kanada, guru diberikan pelatihan khusus mengenai cara mengelola keberagaman di kelas, sehingga mereka dapat menjadi fasilitator yang baik dalam membangun lingkungan belajar yang inklusif.

Dengan demikian, model pendidikan multikultural tidak hanya bertujuan untuk membangun pemahaman lintas agama, tetapi juga untuk membentuk generasi yang lebih toleran, kritis, dan berwawasan global. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog dan interaksi yang harmonis antaragama.

c. Model Kolaborasi Antarumat Beragama

Kolaborasi antarumat beragama merupakan salah satu strategi yang efektif dalam membangun perdamaian dan menciptakan harmoni sosial. Model ini berfokus pada kerja sama antara komunitas yang berbeda agama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Woodward, kerja sama lintas agama dapat mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan rasa saling percaya di antara komunitas yang berbeda keyakinan.²⁸ Di beberapa negara, model kolaboratif ini diwujudkan dalam bentuk forum lintas agama, dialog kebangsaan, serta proyek-proyek sosial yang melibatkan berbagai kelompok agama untuk bekerja bersama dalam mencapai tujuan yang sama.

²⁶ Amin, M. (2022). "The Role of Religious Organizations in Strengthening Multicultural Education," *International Journal of Religious Studies*, 15(2), 45-68.

²⁷ Taylor, C. (2020). "Teacher Training and Multicultural Education: A Comparative Analysis," *Journal of Educational Diversity*, 11(4), 120-137.

²⁸ Woodward, M. (2020). "Interfaith Collaboration as a Tool for Conflict Resolution," *Journal of Peace and Interfaith Dialogue*, 12(3), 101-120.

Salah satu contoh keberhasilan model kolaborasi ini terjadi di Ambon, Indonesia. Setelah mengalami konflik sektarian yang berkepanjangan di awal 2000-an, komunitas Muslim dan Kristen berhasil membangun rekonsiliasi melalui program dialog dan kerja sama sosial.²⁹ Program-program seperti pembangunan kembali rumah ibadah yang hancur, kegiatan ekonomi berbasis komunitas, serta forum diskusi lintas agama telah berkontribusi dalam mengurangi ketegangan dan membangun kembali kepercayaan di antara masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Hasbullah, menunjukkan bahwa inisiatif berbasis komunitas yang melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat memiliki dampak signifikan dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian jangka panjang.³⁰

Selain itu, kolaborasi antarumat beragama juga dapat diperkuat melalui dukungan pemerintah dan organisasi keagamaan. Pemerintah dapat berperan dalam menciptakan regulasi yang mendukung keberagaman, sementara organisasi keagamaan dapat menjadi mediator dalam membangun dialog yang konstruktif. Studi yang dilakukan oleh Putra & Santoso, yang menegaskan bahwa keberhasilan dialog antaragama sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak, baik dari masyarakat sipil, pemuka agama, hingga kebijakan pemerintah yang berpihak pada keberagaman.³¹ Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat, kolaborasi antarumat beragama dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

2. Tantangan dalam Mewujudkan Dialog Antaragama

Meskipun dialog antaragama memiliki banyak manfaat dalam membangun harmoni sosial, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam berbagai konteks, perbedaan keyakinan sering kali menjadi sumber kesalahpahaman yang dapat memicu konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Selain itu, kurangnya ruang dan kesempatan untuk berdialog secara terbuka juga menjadi kendala dalam memperkuat toleransi antarumat beragama. Dalam beberapa kasus, perbedaan interpretasi terhadap ajaran agama dapat memperburuk situasi jika tidak diimbangi dengan sikap saling menghormati dan keterbukaan. Faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi juga turut mempengaruhi keberhasilan dialog

²⁹ Azra, A. (2018). *Rekonsiliasi Pasca-Konflik di Ambon: Peran Agama dalam Perdamaian Sosial*. Jakarta: Pustaka Perdamaian.

³⁰ Hasbullah, M. (2021). "Interfaith Collaboration for Social Harmony in Post-Conflict Societies," *Jurnal Perdamaian dan Rekonsiliasi*, 15(2), 78-95.

³¹ Putra, I., & Santoso, B. (2022). "The Role of Government and Religious Organizations in Strengthening Interfaith Dialogue," *Indonesian Journal of Religious Studies*, 18(1), 34-56.

antaragama, terutama ketika terdapat kepentingan tertentu yang berpotensi menghambat proses komunikasi yang harmonis.

a. Hambatan dalam Dialog Antaragama

1) Intoleransi dan Prasangka

Intoleransi dan prasangka merupakan hambatan utama dalam dialog antaragama. Dalam masyarakat yang multikultural, perbedaan keyakinan seharusnya menjadi kekayaan, namun dalam praktiknya sering kali menimbulkan ketegangan. Penelitian Hefner, menunjukkan bahwa penggunaan agama dalam politik dapat memperuncing perbedaan dan menciptakan segregasi sosial.³² Misalnya, di beberapa negara, kelompok mayoritas sering kali merasa lebih berhak dalam menentukan kebijakan publik, sehingga kelompok minoritas mengalami diskriminasi. Prasangka terhadap agama lain yang diwariskan secara turun-temurun juga memperburuk situasi, karena individu cenderung menilai kelompok lain berdasarkan asumsi dan bukan melalui pengalaman langsung. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya kolektif dalam membangun pemahaman lintas agama yang lebih luas serta kebijakan yang mendorong interaksi positif antarumat beragama.

2) Kurangnya Pemahaman Lintas Agama

Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama lain menjadi kendala dalam membangun komunikasi yang sehat antarumat beragama. Menurut laporan dalam *International Journal of Religious Studies*, banyak masyarakat masih terjebak dalam stereotip negatif akibat minimnya interaksi langsung dengan pemeluk agama lain.³³ Hal ini disebabkan oleh sistem sosial yang kurang mendukung keberagaman, seperti segregasi komunitas berdasarkan agama atau kurangnya pendidikan lintas agama dalam kurikulum sekolah. Akibatnya, kesalahpahaman dan ketidakpercayaan terus berkembang, yang pada akhirnya menghambat upaya dialog. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan pendidikan inklusif yang mengajarkan toleransi dan pemahaman mendalam terhadap berbagai keyakinan, serta program yang mendorong interaksi positif antarumat beragama dalam kehidupan sehari-hari.

³² Hefner, R. (2013). *The Politics of Religious Pluralism in Indonesia: Tolerance and its Limits*. Asian Journal of Social Science, 41(4), 551–577.

³³ Anderson, J. (2017). *Interfaith Dialogue and Religious Stereotypes: A Study on Cross-Religious Interactions*. International Journal of Religious Studies, 25(4), 112–130.

3) Politisasi Agama

Agama sering kali dijadikan alat politik untuk memperoleh dukungan dari kelompok tertentu, yang pada akhirnya memperkuat polarisasi di masyarakat. Setiawan, menjelaskan bahwa politisasi agama dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial karena aktor politik sering mengeksploitasi sentimen keagamaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dampaknya, muncul rivalitas berbasis agama yang merusak kohesi sosial.³⁴ Di beberapa negara, politisasi agama juga menyebabkan peraturan yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu, memperburuk hubungan antarumat beragama. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan regulasi yang tegas dalam memisahkan kepentingan politik dari agama serta kebijakan yang memastikan bahwa agama tidak digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan politik.

Dengan demikian, meskipun dialog antaragama memiliki potensi besar dalam menciptakan harmoni sosial, masih terdapat berbagai hambatan yang menghambat pelaksanaannya secara efektif. Intoleransi dan prasangka yang masih kuat di masyarakat sering kali menghalangi terjadinya komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Selain itu, kurangnya pemahaman lintas agama memperkuat stereotip negatif dan membatasi kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih inklusif. Politisasi agama juga menjadi tantangan serius, di mana kepentingan politik sering kali memperkeruh hubungan antaragama dan memperdalam polarisasi sosial. Secara umum, tantangan dalam mewujudkan dialog antaragama mencakup faktor sosial, politik, dan psikologis yang harus diatasi dengan strategi yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis, mulai dari pendidikan multikultural hingga kebijakan yang mendukung dialog, agar tercipta masyarakat yang lebih toleran dan damai.

b. Solusi untuk Mengatasi Tantangan

1) Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural memiliki peran strategis dalam membentuk sikap inklusif dan menghargai keberagaman. Melalui sistem pendidikan yang menanamkan pemahaman lintas budaya dan agama, masyarakat dapat lebih terbuka terhadap perbedaan. Menurut Tilaar, pendidikan multikultural tidak hanya mengajarkan nilai toleransi, tetapi juga menekankan

³⁴ Setiawan, R. (2019). *Agama dalam Politik: Dampak Politisasi Agama terhadap Polarisasi Sosial di Indonesia*. Jurnal Politik dan Keagamaan, 15(1), 45-60.

pentingnya keadilan sosial dan penghapusan diskriminasi berbasis agama.³⁵ Studi yang dilakukan oleh Kymlicka, di beberapa negara seperti Kanada dan Belanda menunjukkan bahwa integrasi pendidikan multikultural dalam kurikulum sekolah berkontribusi pada peningkatan interaksi positif antaragama serta mengurangi prasangka di kalangan generasi muda.³⁶ Di Indonesia, beberapa madrasah dan sekolah umum telah mulai mengadopsi kurikulum yang memasukkan studi lintas agama guna memperkuat pemahaman terhadap keberagaman.

2) Regulasi Hukum yang Tegas

Penegakan regulasi yang jelas dan tegas sangat penting dalam menjamin kebebasan beragama dan meminimalisir konflik yang bersumber dari perbedaan keyakinan. Menurut Wahid, meskipun Indonesia memiliki sejumlah regulasi seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang melindungi hak beragama, implementasinya masih mengalami kendala akibat ketidaktegasan dalam penegakan hukum serta pengaruh kelompok tertentu dalam pengambilan kebijakan.³⁷ Hal ini juga terjadi di India, di mana meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama, implementasinya sering terhambat oleh dinamika politik dan sosial.³⁸ Oleh karena itu, penguatan regulasi harus diiringi dengan pengawasan yang ketat, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam memastikan kebijakan yang adil bagi semua kelompok agama.

3) Penguatan Nilai-Nilai Toleransi melalui Media

Media memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap keberagaman. Menurut Siregar, media yang menyajikan pemberitaan yang seimbang dan berbasis fakta dapat membantu mengurangi ketegangan antaragama serta mencegah penyebaran ujaran kebencian. Di era digital, media sosial juga menjadi platform utama dalam menyebarkan narasi perdamaian dan toleransi.³⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center, menunjukkan bahwa di Amerika Serikat, kampanye sosial berbasis media digital yang mengangkat isu keberagaman agama telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat

³⁵ Tilaar, H. A. R. (2019). *Pendidikan Multikultural di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

³⁶ Kymlicka, W. (2020). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford University Press.

³⁷ Wahid, A. (2021). *Perlindungan Hak Beragama di Indonesia: Kajian Hukum dan Implementasi*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 25(1), 55-72.

³⁸ Chakrabarty, B. (2020). *Religious Freedom and Political Dynamics in India: Challenges and Perspectives*. Oxford University Press.

³⁹ Siregar, H. (2022). *Media and Religious Harmony: The Role of Journalism in Promoting Tolerance in Indonesia*. Jurnal Komunikasi dan Sosial, 18(2), 112-129.

tentang pentingnya harmoni sosial.⁴⁰ Di Indonesia, upaya serupa juga telah dilakukan melalui berbagai program televisi, film, dan diskusi daring yang melibatkan pemuka agama dan akademisi guna membangun pemahaman lintas agama.

Dengan adanya solusi tersebut, diharapkan dialog antaragama dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan harmoni sosial yang lebih kuat di masyarakat. Pendidikan multikultural berperan dalam membentuk generasi yang lebih toleran dan terbuka terhadap perbedaan, sementara regulasi hukum yang tegas dapat memastikan perlindungan hak beragama bagi setiap individu. Selain itu, media memiliki potensi besar dalam menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan mengurangi prasangka antaragama. Dengan penerapan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, tantangan dalam dialog antaragama dapat diminimalisir, sehingga tercipta lingkungan sosial yang lebih inklusif dan harmonis.

Dengan adanya kombinasi dari pendidikan, kebijakan, dan keterlibatan masyarakat, dialog antaragama dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dengan demikian, dialog antaragama merupakan instrumen penting dalam membangun perdamaian dan harmoni sosial di tengah keberagaman. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti intoleransi, kurangnya pemahaman lintas agama, dan politisasi agama, solusi yang tepat dapat membantu mengatasi hambatan tersebut. Pendidikan multikultural, regulasi hukum yang tegas, serta penguatan nilai-nilai toleransi melalui media menjadi langkah strategis dalam memperkuat dialog antaragama. Selain itu, model-model yang telah diterapkan, seperti pendekatan inklusif, pendidikan multikultural, dan kolaborasi antarumat beragama, menunjukkan bahwa dengan komitmen bersama, perdamaian dapat terwujud. Oleh karena itu, upaya kolektif dari pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dialog antaragama terus berkembang sebagai sarana membangun keharmonisan sosial yang berkelanjutan.

⁴⁰ Pew Research Center. (2021). *Religious Tolerance and Social Media: A Case Study in the United States*. Pew Research Report.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Nimer, M. (2001). *Peacemaking and the Challenge of Interfaith Dialogue Among Muslims and Jews*. International Journal of Peace Studies, 6(1), 23-46.
- Al-Ghazali, A. H. (2019). *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Amin, M. (2022). "The Role of Religious Organizations in Strengthening Multicultural Education," *International Journal of Religious Studies*, 15(2), 45-68.
- Anderson, J. (2017). *Interfaith Dialogue and Religious Stereotypes: A Study on Cross-Religious Interactions*. International Journal of Religious Studies, 25(4), 112-130.
- An-Na'im, A. A. (2018). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Anshori, M., & Nasution, A. (2021). Keberagaman Agama dan Tantangan Sosial di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 7(2), 134-148.
- Armstrong, K. (2020). "Educational Strategies for Promoting Inclusive Interfaith Dialogue," *Global Journal of Interfaith Relations*, 9(4), 101-120.
- Auda, J. (2018). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Azra, A. (2018). *Rekonsiliasi Pasca-Konflik di Ambon: Peran Agama dalam Perdamaian Sosial*. Jakarta: Pustaka Perdamaian.
- Banks, J. A. (2019). *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Wiley.
- Barnes, M. (2018). "The Role of Equality-Based Interfaith Dialogue in Reducing Stereotypes," *Religious Pluralism Journal*, 12(3), 45-67.
- Chakrabarty, B. (2020). *Religious Freedom and Political Dynamics in India: Challenges and Perspectives*. Oxford University Press.
- Effendi, M. (2023). Membangun Kehidupan Toleransi Beragama dalam Komunitas. *Jurnal BAKTI*, 1(2), 125-130.
- Effendy, B. (2018). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Paramadina.
- Fauziah, A., & Ashifa, W. A. N. (2024). Peran Dialog Antar Agama dalam Mewujudkan Lingkungan yang Harmonis dan Keselarasan dalam Masyarakat. *Jurnal Global Islamika*, 2(2), 11-19.
- Gadamer, H. G. (2014). *Truth and Method*. Bloomsbury Publishing.

- Galtung, J. (2019). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191.
- Hasbullah, M. (2021). "Interfaith Collaboration for Social Harmony in Post-Conflict Societies," *Jurnal Perdamaian dan Rekonsiliasi*, 15(2), 78-95.
- Hefner, R. (2013). *The Politics of Religious Pluralism in Indonesia: Tolerance and its Limits*. Asian Journal of Social Science, 41(4), 551–577.
- Hidayat, R. (2021). "The Contribution of NU and Muhammadiyah in Interfaith Dialogue," *Jurnal Moderasi Islam*, 9(1), 12-34.
- Huntington, S. P. (2018). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Simon & Schuster.
- Krismiyo, A., & Kii, R. I. (2023). Membangun Harmoni dan Dialog Antar Agama dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(3), 238-244.
- Kymlicka, W. (2020). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford University Press.
- Lederach, J. P. (2018). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. United States Institute of Peace Press.
- Pew Research Center. (2021). *Religious Tolerance and Social Media: A Case Study in the United States*. Pew Research Report.
- Putra, I., & Santoso, B. (2022). "The Role of Government and Religious Organizations in Strengthening Interfaith Dialogue," *Indonesian Journal of Religious Studies*, 18(1), 34-56.
- Rahman, A., & Suryani, T. (2022). Meningkatkan Peran Tokoh Agama dalam Menyebarkan Nilai-Nilai Toleransi. *Jurnal Kepemimpinan Agama dan Dialog Antaragama*, 5(1), 55-68.
- Ricklefs, M. C. (2012). *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, and Religious History, c.1930 to the Present*. University of Hawaii Press.
- Setiawan, R. (2019). *Agama dalam Politik: Dampak Politisasi Agama terhadap Polarisasi Sosial di Indonesia*. Jurnal Politik dan Keagamaan, 15(1), 45-60.
- Siregar, H. (2022). *Media and Religious Harmony: The Role of Journalism in Promoting Tolerance in Indonesia*. Jurnal Komunikasi dan Sosial, 18(2), 112-129.

- Smith, J. (2020). "Effective Communication in Interfaith Dialogue," *Journal of Interreligious Studies*, 12(3), 45-60.
- Susanto, E. (2021). "Multicultural Education and Religious Tolerance in Indonesian Schools," *Jurnal Pendidikan Multikultural*, 14(3), 89-105.
- Swidler, L. (2017). The Dialogue Decalogue: Ground Rules for Interreligious Dialogue. *Journal of Ecumenical Studies*, 20(1), 1-4.
- Taylor, C. (2020). "Teacher Training and Multicultural Education: A Comparative Analysis," *Journal of Educational Diversity*, 11(4), 120-137.
- Tilaar, H. A. R. (2019). *Pendidikan Multikultural di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wahid, A. (2016). "Pancasila as a Foundation for Inclusive Religious Dialogue in Indonesia," *Jurnal Keberagaman dan Perdamaian*, 8(2), 78-92.
- Wahid, A. (2020). "Integrating Multicultural Values in Civic Education Curriculum," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 67-89.
- Wahid, A. (2021). *Perlindungan Hak Beragama di Indonesia: Kajian Hukum dan Implementasi*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 25(1), 55-72.
- Wijayanti, D., & Nurdin, M. (2023). Pendidikan Berbasis Dialog Antaragama untuk Mencegah Konflik Sosial. *Jurnal Al-Mubarak*, 4(2), 90-105.
- Woodward, M. (2020). "Interfaith Collaboration as a Tool for Conflict Resolution," *Journal of Peace and Interfaith Dialogue*, 12(3), 101-120.